



## 6 Kali Berturut-turut Raih WTP

**SAMBAS, TRIBUN** - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, Selasa (9/5).

Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono kepada Bupati Sambas, H Satono dan Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar S.Pd I, di Ruang Pertemuan Kantor BPK RI Kalimantan Barat.

Untuk Opini atas hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Pemprov Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

Bupati Sambas, H Satono mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Baginya, opini WTP yang keenam kalinya secara berturut-turut adalah bukti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Kita sadar, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja pemerintah yang menjadi bagian dari amanah masyarakat kepada pemerintah," ujarnya.

Bupati Satono mengatakan, audit keuangan daerah dari BPK RI adalah refleksi pola demokrasi dan sebagai upaya kendali atas integritas pemerintah dalam upaya mempertegas prosperity development.

"Sesuai amanah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 be-



**Kita sadar, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja pemerintah**

**Satono**  
Bupati Sambas

serta perubahannya tentang Pemerintah Daerah. Kabupaten dan kota se-Kalbar telah melaksanakan kewajiban menyerahkan LKPD kepada BPK untuk diaudit," katanya.

Bupati Satono mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kalbar yang telah melakukan pemeriksaan interim pada bulan November 2022 dan dilanjutkan bulan Januari 2023. Serta pemeriksaan terperinci pada bulan Maret 2023.

"Atas nama pemerintah, saya sangat berterimakasih atas segala masukan dan koreksi serta langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Kalbar," katanya.

Atas capaian itu, Ketua DPRD Sambas Abu Bakar memberikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Bupati Sambas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

"Alhamdulillah, Kabupaten Sambas kembali mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP lagi. Kami dari legislatif, mengucapkan Selamat atas capaian dimaksud dan

apresiasi yang setinggi-tingginya," ungkap H Abu Bakar, Rabu.

Selain Ketua DPRD Sambas, beberapa pimpinan daerah dan pimpinan DPRD kabupaten kota di Kalimantan Barat turut menghadiri penyerahan LHP LKPD itu. Di antaranya dari pejabat Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kota Singkawang, dan Kabupaten Melawi

Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar berharap Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan segera ditindaklanjuti Pemerintah Daerah. Sesuai Peraturan tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan di terima.

"Laporan Hasil Pemeriksaan ini harus menjadi perhatian bersama, dan akan lebih berharga apabila diikuti dengan tidak lanjut sebagaimana disarankan oleh BPK," ujarnya.

Diingatkan Abu Bakar, wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan imbuah dia, disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya sesuai aturan yang mengatur adalah 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

"Kita menyambut baik, LHP dan opini WTP ini, tentunya ini menjadi bahan kami di legislatif dan membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah," ungkapnya. (mam)